


Efektivitas Pendampingan dan Diskusi Kelompok Terarah dalam Memperluas Akses Kredit Usaha Rakyat bagi UMK

¹⁾Raden Parianom *, ²⁾Ully Vidriza, ³⁾Risna Triandhari

^{1,2)}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

³⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia dan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah, Indonesia

*Email Corresponding: radenparianom@upnvj.ac.id.

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: UMK Akses Kredit KUR Pemberdayaan	Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilatarbelakangi oleh rendahnya akses Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap program Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kota Cibinong. Permasalahan utama yang ditemukan adalah keterbatasan pemahaman UMK mengenai prosedur KUR, minimnya kemampuan penyusunan laporan keuangan, serta rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pemasaran. Metode pelaksanaan dilakukan melalui diskusi kelompok terarah dan pendampingan teknis kepada 75 UMK. Kegiatan mencakup literasi KUR, pelatihan penyusunan laporan keuangan, dan pemanfaatan teknologi pemasaran digital. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan terhadap pemahaman UMK mengenai KUR, keterampilan penyusunan laporan keuangan, serta adopsi teknologi pemasaran. Diskusi kelompok terarah terbukti efektif sebagai metode pemberdayaan UMK untuk meningkatkan akses pembiayaan formal. Kegiatan ini juga memberikan kontribusi pada pengurangan kesenjangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Oleh karena itu, pendampingan UMK perlu terus dilakukan secara berkelanjutan agar dampaknya dapat lebih luas dan berkesinambungan.
Keywords: MSEs Credit Access KUR FGD Empowerment	ABSTRACT This community service program was motivated by the limited access of Micro and Small Enterprises (MSEs) to the People's Business Credit (KUR) program in Cibinong City. The main problems identified include the lack of understanding about KUR procedures, limited financial reporting skills, and low adoption of digital marketing technology. The implementation method involved Focus Group Discussions (FGDs) and technical assistance provided to 75 MSEs, divided into treatment and control groups. The activities included KUR literacy, training on financial report preparation, and the utilization of digital marketing technology. The results demonstrated a significant improvement in MSEs' understanding of KUR, their ability to prepare financial reports, and the adoption of marketing technology. FGDs proved to be effective as an empowerment method to increase access to formal financing. This program also contributed to reducing economic inequality and empowering local communities. Therefore, continuous mentoring for MSEs is necessary to ensure broader and sustainable impact.
	This is an open access article under the CC-BY-SA license.
	

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diyakini memegang peran penting atas pertumbuhan perekonomian Indonesia. Kamar Dagang Indonesia (Kadin) menyatakan bahwa pada tahun 2023, sektor UMKM berhasil memberikan kontribusi pada produk domestik bruto Indonesia (PDB) sebesar Rp9.580 triliun atau sekitar 61% dari seluruh jumlah PDB di Indonesia. Lebih jauh lagi, sektor ini juga berjasa dalam peningkatan daya serap tenaga kerja masyarakat di Indonesia yang mana pada tahun 2023, UMKM berkontribusi dalam 97% penyerapan tenaga kerja di Indonesia (Indonesia 2025). Perannya sebagai katalisator dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di pedesaan juga menjadi sebuah poin penting yang menunjukkan bahwa UMKM telah menjadi simbol ekonomi kemasyarakatan di masa kini (Devita, Umaryadi, and Wahab 2024). Dengan demikian, peran Usaha Mikro dan Menengah di Indonesia dapat

dikatakan sangat signifikan dalam mengurangi jumlah pengangguran dan kemiskinan (Wahyudi, Yulivan, and Rahman 2024).

Namun demikian, terlepas dari pentingnya peran UMKM di Indonesia, para pelaku UMKM seringkali masih dihadapi oleh berbagai rintangan yang mana salah satu dan paling utamanya datang dalam bentuk keterbatasan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Hal tersebut dibuktikan dalam hasil survei terbaru yang diperoleh oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menunjukkan bahwa sebesar 51% tantangan yang dihadapi oleh sektor UMKM bersumber dari keterbatasan pada akses modal dan pembiayaan (APINDO: Access to Finance and Capital is the Main Challenge for MSMEs XXXX). Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, pada tahun 2007, pemerintah resmi meluncurkan sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan akses pembiayaan terhadap usaha mikro kecil. Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan langkah awal pemerintah dalam mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil (UMK). Kebijakan ini sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 mengenai Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, khususnya dalam kerangka reformasi sektor keuangan. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan PMK Nomor 20/PMK.05/2016 yang mengatur mekanisme pelaksanaan subsidi bunga KUR. Fokus pemerintah dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro dan kecil didasarkan pada peran strategisnya dalam menyerap tenaga kerja, terutama melalui pemanfaatan sumber daya alam lokal. Pertumbuhan sektor ini dipandang mampu memberikan kontribusi dalam penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pemerataan distribusi pendapatan, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan (Noviarita, Nazroi, and Mutmainnah 2022). Dengan demikian, KUR dirancang untuk mempercepat perkembangan aktivitas ekonomi, khususnya pada sektor riil. Tujuan utamanya adalah mengurangi tingkat kemiskinan sekaligus memperluas kesempatan kerja.

Meskipun Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara aktif telah diberikan terhadap para pelaku usaha UMKM, beberapa penelitian dan laporan menunjukkan bahwa sebagian besar Usaha Mikro Kecil yang beroperasi dengan modal ultra rendah masih mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses pembiayaan. Dengan demikian, sebagian besar modal yang dapat diperoleh hanya berasal dari dana pribadi tanpa bantuan akses terhadap lembaga keuangan formal. Namun apabila dilihat dari sisi lembaga keuangan sendiri, memberikan pinjaman terhadap pelaku Usaha Mikro Kecil seringkali dapat lebih beresiko mengingat tidak adanya kepemilikan jaminan yang dapat diberikan kepada bank (Sianturi and Sitio 2024). Adapun penelitian (Setyawati 2025) menunjukkan bahwa rendahnya akses pembiayaan terhadap Usaha Mikro Kecil juga disebabkan oleh karena rendahnya kapasitas literasi keuangan para pelaku Usaha Mikro Kecil yang salah satunya ditunjukkan dari tidak adanya catatan laporan keuangan bisnis yang dilakukan secara sistematis.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan laporan yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2024, 99.71% atau sekitar kurang lebih 30.09 juta unit usaha merupakan usaha mikro yang dalam hal ini seringkali menghadapi tantangan dalam mendapatkan akses pembiayaan lembaga keuangan formal. Selain itu, unit usaha kecil dalam hal ini menduduki jumlah usaha kedua terbanyak setelah usaha mikro, yaitu sebesar 73.816. Cibinong dalam hal ini menjadi salah satu kota dengan dominasi unit Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang sangat besar yaitu 97,43% (Statistik 2023).



Gambar 1. Perkembangan Jumlah Debitur KUR di Cibinong, Jawa Barat

Namun, disisi adanya potensi ekonomi yang dapat dihasilkan, penyaluran KUR terhadap pelaku UMK di Cibinong dipandang masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur pengajuan, rendahnya literasi keuangan, serta minimnya penggunaan teknologi dalam aktivitas bisnis (Setyawati 2025). Padahal, apabila dilihat dari data perkembangan jumlah debitur di kota Cibinong, jumlahnya kian meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan masih rendahnya keterlibatan UMK pada program pembiayaan KUR. Hal ini dapat terjadi akibat adanya keterbatasan literasi keuangan dan kemampuan administrasi dapat hambatan utama UMK dalam mengakses kredit formal. Oleh karena itu, diperlukan intervensi melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang bersifat praktis dan langsung menyentuh kebutuhan UMK di Cibinong. Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan literasi KUR, keterampilan menyusun laporan keuangan, serta pemanfaatan teknologi pemasaran melalui pelatihan dan pendampingan berbasis Diskusi kelompok terarah.

II. MASALAH

Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dewasa ini dipandang sebagai salah satu sektor yang mendorong perkembangan perekonomian di kota Depok (Veronika et al. 2024). Namun, disisi menjadi tulang punggung atas kondisi ekonomi masyarakatnya, tidak sedikit para pelaku UMKM, khususnya para pelaku unit bisnis mikro dan kecil di Cibinong yang masih menghadapi berbagai kendala dan tantangan. (Savira, Pinem, and Nawir 2021) menyatakan bahwa pada dasarnya pembiayaan dan jumlah investor yang sedikit masih menjadi tantangan terbesar bagi para UMK di Cibinong sehingga mereka kesulitan dalam mengembangkan bisnisnya secara lebih lanjut. Dalam hal ini, meskipun pemerintah Cibinong secara aktif telah menyalurkan bantuan KUR pada pelaku UMKM di Cibinong. Fakta tersebut sejalan dengan hasil survei nasional yang menyatakan bahwa sekitar 74% UMKM di Indonesia belum memiliki akses pembiayaan formal karena terkendala syarat agunan, lemahnya laporan keuangan, serta kerumitan administrasi (Hasibuan and Marliyah 2024). Hal tersebut masih belum bisa mengatasi masalah keterbatasan modal yang dihadapi oleh pelaku bisnis mikro dan kecil (UMK). Adapun hal tersebut terjadi dikarenakan oleh beberapa hal, seperti masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan manfaat KUR, terbatasnya kemampuan masyarakat dalam menyusun laporan keuangan sederhana dan rendahnya pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran (Widyastuti and Parianom 2022).

Hasil survei Otoritas Jasa Keuangan (Keuangan 2023) menunjukkan bahwa literasi keuangan pelaku UMKM di Jawa Barat masih berada di bawah rata-rata nasional, sedangkan inklusi keuangan meskipun meningkat belum sepenuhnya menyentuh pelaku usaha mikro. Data (Statistik 2023) juga memperlihatkan bahwa kontribusi UMKM terhadap PDRB Kota Cibinong meningkat signifikan namun masih belum diikuti oleh peningkatan daya serap kredit formal. Oleh karena itu, berangkat dari berbagai analisis permasalahan yang dialami oleh para pemilik Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di kota Cibinong, diperlukan adanya sebuah analisis tentang efektivitas program pendampingan yang terstruktur terhadap para pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) sehingga dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ada. Adapun pelaksanaan pendampingan akan dilakukan melalui *Diskusi kelompok terarah* untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan motivasi kepada pelaku UMK agar mampu meningkatkan kapasitasnya dalam mengakses pembiayaan formal, terutama Kredit Usaha Rakyat (KUR).



Gambar 2. Lokasi Pendampingan UMK

III. METODE

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan langsung pelaku UMK. Dalam hal ini, sebanyak 75 UMK di Kota Cibinong dilibatkan sebagai sasaran atas kegiatan yang akan dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu: (1) identifikasi masalah dan kebutuhan UMK; (2) pelaksanaan diskusi kelompok terarah dan pendampingan yang berisi pelatihan literasi KUR, penyusunan laporan keuangan, serta pemanfaatan teknologi pemasaran; dan (3) evaluasi hasil melalui perbandingan kondisi sebelum dan sesudah pendampingan.



Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Program

Metode diskusi kelompok terarah juga digunakan sebagai metode penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengetahui kualitas dan kapasitas kemampuan masyarakat dalam mengelola bisnis serta sebagai

sarana pelatihan bisnis bagi para pelaku UMK sehingga mereka dapat mendapatkan akses pembiayaan yang lebih mudah (Setyawati 2025). Penggunaan metode diskusi kelompok terarah dalam kegiatan ini dipandang relevan karena memiliki keunggulan dalam menggali persepsi, pengalaman, serta kebutuhan peserta secara lebih mendalam dibandingkan survei kuantitatif semata. Menurut (Krueger and Casey 2015), FGD merupakan salah satu metode partisipatif yang efektif untuk memahami perilaku dan kebutuhan kelompok sasaran melalui diskusi terarah.

Dalam konteks pemberdayaan UMKM, diskusi kelompok terarah terbukti mampu menjadi sarana pembelajaran sosial yang tidak hanya memberikan transfer pengetahuan, tetapi juga memfasilitasi kolaborasi antar pelaku usaha. (Pratama, Aulia, and Afriyenti 2025) dalam penelitiannya di Karawang menunjukkan bahwa pelatihan berbasis diskusi kelompok terarah dapat meningkatkan keaktifan peserta dalam memahami prosedur pengajuan kredit serta mendorong adopsi teknologi pemasaran. Hal senada juga dikemukakan oleh (Johadi, Rahayu, and Nugroho 2023) yang menemukan bahwa pendampingan berbasis diskusi kelompok efektif dalam membantu UMKM mengatasi keterbatasan pengetahuan terkait akses keuangan dan penyusunan laporan usaha.

Kegiatan pendampingan dan diskusi kelompok terarah dalam program pengabdian ini dirancang secara sistematis dan dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut dengan tujuan memberikan pemahaman yang komprehensif sekaligus keterampilan praktis bagi pelaku Usaha Mikro Kecil (UMK). Pada hari pertama, kegiatan difokuskan pada diskusi kelompok terarah yang menghadirkan narasumber dari lembaga perbankan, khususnya bank penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam sesi ini, pelaku UMK mendapatkan penjelasan langsung mengenai konsep KUR, tujuan program, serta manfaat yang dapat diperoleh. Selain itu, disampaikan pula informasi rinci mengenai persyaratan pengajuan, tahapan proses administrasi, hingga mekanisme evaluasi kelayakan yang dilakukan oleh pihak bank. Dengan demikian, para pelaku usaha tidak hanya memahami KUR secara umum, tetapi juga mengetahui hambatan dan peluang yang mungkin mereka hadapi saat mengajukan kredit.

Selanjutnya, pada hari kedua, kegiatan beralih kepada pendampingan teknis terkait penyusunan laporan keuangan. Fasilitator memberikan arahan mengenai pentingnya pencatatan keuangan yang baik, mengingat laporan keuangan merupakan salah satu syarat utama dalam pengajuan KUR. Pelaku UMK dilatih menyusun laporan sederhana yang mencakup catatan arus kas, laporan laba rugi, serta pencatatan aset dan kewajiban. Pendampingan ini tidak hanya menekankan aspek teknis, tetapi juga mengajarkan mindset bahwa pengelolaan keuangan yang transparan dan tertib akan memudahkan mereka mengakses pembiayaan formal, meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan, serta membantu dalam pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat.

Pada hari ketiga, program difokuskan pada pendampingan teknis untuk memastikan para pelaku UMK siap memenuhi syarat-syarat administratif dan substansi dalam pengajuan KUR. Kegiatan ini mencakup simulasi pengisian formulir aplikasi kredit, pengumpulan dokumen legalitas usaha, serta penyusunan profil usaha yang dapat meyakinkan pihak bank. Fasilitator juga memberikan contoh kasus nyata tentang bagaimana UMK yang telah memenuhi seluruh persyaratan dapat berhasil memperoleh pembiayaan, sekaligus mendiskusikan tantangan umum yang sering muncul, seperti keterbatasan agunan, kurangnya riwayat kredit, atau kendala administrasi. Selain itu, pada hari ketiga juga diberikan pendampingan mengenai pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pemasaran produk UMK. Peserta diperkenalkan dengan strategi sederhana berbasis media sosial dan marketplace daring sebagai sarana promosi, memperluas jaringan konsumen, serta menjaga keberlanjutan usaha di tengah persaingan pasar. Dengan pendampingan ini, diharapkan peserta mampu menyiapkan dokumen dan persyaratan dengan lebih baik sekaligus memiliki bekal awal dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai penunjang keberhasilan usaha, sehingga peluang mereka dalam mengakses kredit KUR sekaligus bertahan di pasar menjadi lebih besar.

Tabel 1. Rangkaian Kegiatan Pendampingan dan Diskusi Kelompok Terarah

Hari	Fokus Kegiatan	Tujuan	Hasil yang Diharapkan
Hari 1	Diskusi kelompok dengan lembaga perbankan	Memberikan pemahaman mendalam tentang program KUR, prosedur, dan persyaratan pengajuan	Memberikan pemahaman mendalam tentang program KUR, prosedur, dan persyaratan

Hari 2	Pendampingan penyusunan laporan keuangan	Meningkatkan keterampilan pelaku UMK dalam mencatat dan menyusun laporan keuangan sederhana	pengajuan Peserta mampu menyusun laporan keuangan yang rapi, sistematis, dan sesuai standar sederhana
Hari 3	Pendampingan teknis KUR & pengenalan teknologi digital pemasaran	Membimbing peserta menyiapkan dokumen dan administrasi pengajuan KUR serta memahami strategi pemasaran digital	Peserta siap mengisi formulir, menyiapkan dokumen usaha, serta mulai memanfaatkan media digital untuk memperluas pasar

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat 75 partisipan UMK yang dilibatkan dalam proses mendapatkan pendampingan dan diskusi kelompok terarah. Tujuan dari diskusi kelompok terarah adalah untuk mengetahui pendapat dan pemikiran para pelaku UMK terkait permasalahan yang mereka hadapi untuk mendapatkan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diberikan dalam rangka mendorong pemberdayaan dan mengentaskan kemiskinan masyarakat. Hasil analisis penelitian lapangan menunjukkan bahwa kelompok UMK yang berpartisipasi dalam diskusi kelompok terarah mampu mendapatkan akses pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara lebih mudah. Hal tersebut terjadi oleh karena para pelaku UMK yang mendapatkan pemahaman melalui diskusi kelompok terarah cenderung memperoleh pemahaman yang lebih memadai terkait pembiayaan KUR, seperti halnya seputar cara pengajuan dan manfaat dari KUR. Selain itu, para partisipan juga menunjukkan pemahaman dan ketertarikan yang lebih baik terkait penyusunan laporan keuangan dan adopsi teknologi pada operasional bisnis.

Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan pada ketiga aspek utama yang menjadi fokus pendampingan. Pada aspek pemahaman KUR, skor awal peserta hanya berada pada angka 2, namun setelah pendampingan meningkat tajam menjadi 75. Peningkatan ini menunjukkan bahwa diskusi kelompok terarah yang menghadirkan pihak perbankan mampu menjembatani kesenjangan informasi terkait prosedur, syarat, dan manfaat program KUR. Hasil ini sejalan dengan temuan (Dwijaksara and Andromeda 2024) yang menekankan bahwa keterbatasan literasi menjadi faktor utama yang menghambat akses UMK terhadap pembiayaan formal.

Selanjutnya, pada aspek laporan keuangan, skor awal peserta sebesar 5 meningkat menjadi 70 setelah kegiatan. Hal ini memperlihatkan bahwa pelatihan teknis penyusunan laporan keuangan sederhana memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan keterampilan pencatatan usaha. Temuan ini sejalan dengan (Hasibuan and Marliyah 2024) yang menyatakan bahwa rendahnya kemampuan penyusunan laporan keuangan menjadi salah satu hambatan besar bagi UMK dalam memenuhi persyaratan administratif perbankan. Dengan adanya peningkatan keterampilan ini, UMK menjadi lebih siap dalam menyusun laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai bukti kelayakan usaha di mata lembaga keuangan.

Adapun pada aspek teknologi pemasaran, skor meningkat dari 5 menjadi 70, yang berarti terdapat lonjakan pemahaman hingga 100%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pengenalan strategi pemasaran berbasis teknologi digital sangat relevan dengan kebutuhan UMK di era transformasi digital. Literasi digital yang lebih baik memungkinkan pelaku UMK memperluas pasar, meningkatkan daya saing, dan menjaga keberlanjutan usaha. Hal ini sejalan dengan (Jati 2025) yang menegaskan bahwa UMK yang mengadopsi teknologi digital lebih adaptif dan resilien terhadap tantangan pasar.



Gambar 3. Peningkatan Jumlah UMK Hasil Pendampingan dan Diskusi Kelompok Terarah
Sumber: Olahan Penulis

Hasil analisis tersebut secara tidak langsung menunjukkan bagaimana krusialnya peran pembinaan dalam meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat terkait operasional bisnis dan keuangan yang dapat memperbesar potensi keterlibatan para pelaku UMK dalam program pembiayaan KUR masyarakat di Cibinong, Jawa barat. Penemuan tersebut sejalan dengan beberapa penelitian lapangan di daerah lain seperti Bali, Karawang, dan Wonogiri (Johadi et al. 2023) juga menunjukkan penemuan yang sama bahwa pendampingan langsung dalam proses pengajuan kredit, pengembangan platform digital bersama, dan aksi dukungan sosial dari komunitas menjadi kunci utama yang dapat membantu para UMK menjadi lebih maju dan dapat melewati hambatan pembiayaan yang bersumber dari kurangnya literasi masyarakat.

V. KESIMPULAN

Meningkatnya kapasitas pengetahuan masyarakat mengenai pengelolaan bisnis dan pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat melalui *Diskusi kelompok terarah* secara efektif mampu meningkatkan tingkat literasi keuangan masyarakat. Selain itu, kegiatan ini juga berhasil meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap proses penyusunan laporan keuangan yang baik serta cara memanfaatkan teknologi dan ekosistem digital dalam proses pemasaran produk.

Dari temuan tersebut, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat diambil. Pertama, pemerintah daerah Kota Cibinong bersama lembaga perbankan perlu memperkuat sinergi dalam menyediakan program pendampingan berkelanjutan, tidak hanya sebatas penyaluran kredit, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas manajerial dan literasi digital pelaku UMK. Kedua, bank penyalur KUR dapat mengadopsi pendekatan inklusif dengan memberikan persyaratan yang lebih fleksibel serta menyediakan layanan konsultasi khusus untuk UMK yang baru merintis usaha. Ketiga, pemerintah pusat dapat mengintegrasikan program KUR dengan target pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), khususnya SDG 1 (*No Poverty*) dan SDG 8 (*Decent Work and Economic Growth*), sehingga intervensi pembiayaan tidak hanya berdampak ekonomi tetapi juga sosial.

Selain itu, penelitian ini juga membuka peluang bagi riset lanjutan. Pertama, kajian mendalam dapat dilakukan untuk mengukur dampak jangka panjang pendampingan terhadap keberlanjutan usaha dan tingkat pengembalian kredit. Kedua, penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan dengan memasukkan variabel lain seperti peran gender, dukungan komunitas bisnis, serta integrasi dengan platform fintech atau lembaga keuangan syariah. Ketiga, perlu dilakukan perbandingan lintas daerah antara UMK perkotaan dan pedesaan untuk melihat perbedaan efektivitas program pendampingan. Dengan demikian, hasil riset lanjutan dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif bagi penyusunan kebijakan pengembangan UMK di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada UPNVJ atas dukungan pendanaan dalam kegiatan ini. Terima kasih juga kepada para pelaku UMK di Kota Cibinong yang telah berpartisipasi aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan.

DAFTAR PUSTAKA

APINDO: Access to Finance and Capital is the Main Challenge for MSMEs. XXXX.

- Devita, H., M. E. W. Umaryadi, and Wahab. 2024. "THE ROLE OF UMKM IN DRIVING THE LOCAL ECONOMY: A LITERATURE ANALYSIS [Journal-Article]." *Journal of Community Dedication* 4(No. 3):581–93.
- Dwijaksara, Bella, and Safrian Andromeda. 2024. "Peran AI Dalam Mengatasi Tantangan Diagnosis Dini Autisme: Solusi Teknologi Dan Implikasinya." *Jurnal Kesehatan Dan Kebidanan Nusantara* 2(2):36–43.
- Hasibuan, R. and Marliyah. 2024. "Analisis akses pembiayaan formal UMKM di Indonesia." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia* 15(1):55–70.
- Indonesia K. A. D. I. N. 2025. "UMKM Indonesia - KADIN Indonesia. Kadin Indonesia."
- Jati, G. 2025. "Green SMEs as the Backbone of Economic Transformation."
- Johadi, J., S. a T. Rahayu, and A. A. Nugroho. 2023. "Meningkatkan akses keuangan UMKM unggulan Kabupaten Wonogiri." *KUAT Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan* 5(1):37–40. doi:10.31092/kuat.v5i1.1870.
- Keuangan, Otoritas Jasa. 2023. "Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2023."
- Krueger, R. A., and M. A. Casey. 2015. *Focus Groups: A Practical Guide for Applied Research*. SAGE Publications.
- Noviarita, H., A. Nazroi, and Mutmainnah. 2022. "Analysis of the effectiveness of business credit funds (KUR) in increasing micro business productivity (case study on BRI customer unit Tugumulyo." *Khozana: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5(2):101–10.
- Pratama, F. H., F. Aulia, and L. U. Afriyenti. 2025. "FGD Pengembangan UMKM pada Masyarakat Desa Mekarpohaci Kabupaten Karawang." *Jurnal Pengabdian Sosial* 2(3):3308–12. doi:10.59837/a08fyn67.
- Savira, D. D., D. Pinem, and J. Nawir. 2021. "Analisis keputusan investasi pelaku UMKM di Kota Cibinong, Jawa Barat." *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 6(8):3760–71. doi:10.36418/syntax-literate.v6i8.3761.
- Setyawati, N. I. 2025. "Gaps in Access to People's Business Credit Financing for MSEs in Cibinong, West Java Experimental Design Approach." *Deleted Journal* 32(7s):485–503. doi:10.52783/cana.v32.3459.
- Sianturi, Fricles A., and Arjon Samuel Sitio. 2024. "Penerapan Pelatihan Desain Grafis Untuk Mendorong Kreativitas Siswa SMA." *Jurnal Pengabdian Ruru* 1(1):1–10.
- Statistik, Badan Pusat. 2023. "Statistik UMKM Kota Cibinong 2023."
- Veronika, N. E., N. I. Izti, N. C. Yunita, N. N. Pebriyani, and N. D. Dirgantara. 2024. "Peran UMKM di Kota Cibinong dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan dan Kesejahteraan Masyarakat pada Provinsi Jawa Barat." *Wawasan Jurnal Ilmu Manajemen Ekonomi Dan Kewirausahaan* 3(1):01–17. doi:10.58192/wawasan.v3i1.2669.
- Wahyudi, A. S., I. Yulivan, and A. Rahman. 2024. "The role of Micro, Small, and medium Enterprises (MSMEs) in supporting Indonesia's economic resilience." *Jurnal Pertahanan Media Informasi Tentang Kajian Dan Strategi Pertahanan Yang Mengedepankan Identity Nasionalism Dan Integrity* 10(2):297–307. doi:10.33172/jp.v10i2.19519.
- Widyastuti, T., and R. Parianom. 2022. "Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Kota Cibinong Di Masa Pandemi COVID-19." *Jurnal ABDINUS Jurnal Pengabdian Nusantara* 6(1):203–12. doi:10.29407/ja.v6i1.16718.